

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963, dan kemudian semakin dikenal melalui karya Freeman yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* yang terbit pada tahun 1984. Menurut Freeman dalam Mahajan et al (2023), keberhasilan jangka panjang perusahaan ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Setiap pihak memiliki peran dalam memengaruhi keputusan dan aktivitas operasional perusahaan. Mahajan et al (2023) juga menekankan bahwa dukungan dari pemangku kepentingan selain investor memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan konsep tersebut, *Stakeholder theory* menekankan bahwa perusahaan perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Pihak internal seperti manajemen dan karyawan berperan dalam menjalankan operasional perusahaan, sedangkan pihak eksternal seperti investor, pemerintah, konsumen, dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dapat mempertahankan dukungan dari para pemangku kepentingan. Penelitian (Nisa et al., 2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena memperoleh kepercayaan dan legitimasi yang lebih tinggi dari berbagai pihak.

Stakeholder theory relevan dengan penelitian ini karena *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *Intellectual Capital* mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada keuntungan finansial semata, tetapi juga kemampuannya dalam menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan (Safriani & Utomo, 2020), sedangkan *Intellectual Capital* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya tidak berwujud. Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Shan et al., 2025).

2.1.2 *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

2.1.2.1 *Pengertian Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Implementasi *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam dunia investasi, kini dipandang sebagai faktor penting yang menentukan strategi jangka panjang. Zhao et al (2025) mengungkapkan bahwa terjadi perubahan signifikan di mana investor kini menjadikan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai parameter utama, bukan lagi sekedar pelengkap dalam menilai sebuah perusahaan. Hal ini didorong oleh kesadaran investor untuk mengevaluasi dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan sosial secara komprehensif. Sejalan dengan itu, perusahaan yang mengedepankan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dianggap lebih kredibel karena memiliki profil risiko yang lebih rendah dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global (Minggu et al., 2023).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (2022) dalam Sofia (2024) pengertian *Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah sebagai berikut:

“*Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah proses mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko sehingga menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan”.

Menurut Suripno (2025:8) pengertian *Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah sebagai berikut:

“*Environmental, Social, and Governance (ESG)* merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam tiga domain utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan”.

Menurut Luqyana (2020) pengertian *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah sebagai berikut:

“*Environmental Social Governance* (ESG) merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria yaitu *Environmental* (lingkungan), *Social* (sosial) dan *Governance* (tata kelola) perusahaan. Dengan kata lain perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan terus mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga selaras dengan keberlangsungan tiga elemen tersebut”.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan suatu kerangka kerja yang menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis maupun investasi perusahaan. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak hanya berfungsi sebagai standar dalam praktik investasi, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko dan peluang jangka panjang. Selain itu, *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban nonfinansial sekaligus sarana untuk menciptakan nilai berkelanjutan dan meningkatkan legitimasi di mata para pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Dimensi *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Menurut Tarihoran et al (2025) setiap dimensi dalam *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam menciptakan praktik bisnis yang beretika, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

1. *Environmental* (Lingkungan)

Dimensi *Environmental* meliputi penggunaan energi oleh perusahaan, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap makhluk hidup akibat aktivitas operasional perusahaan, termasuk isu emisi karbon dan perubahan iklim. Dimensi ini menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik melalui pengelolaan sumber daya alam dan energi secara bijak, serta partisipasi dalam kegiatan yang memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti reboisasi atau penanaman kembali mangrove.

2. *Social* (Sosial)

Dimensi *Social* fokus pada hubungan perusahaan dengan individu, komunitas, dan institusi di sekitar wilayah operasionalnya, termasuk isu ketenagakerjaan, keberagaman, dan inklusi. Dimensi ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam membangun serta menjaga hubungan baik, baik secara internal dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok, maupun secara eksternal dengan masyarakat sekitar dan institusi terkait.

3. *Governance* (Tata Kelola)

Dimensi *Governance* mencakup sistem, praktik, mekanisme pengendalian, dan prosedur internal yang diterapkan perusahaan dalam mengelola organisasi, mengambil keputusan secara efektif, mematuhi peraturan, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan eksternal. Dimensi ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara

transparan, akuntabel, dan tidak merugikan pihak lain demi kepentingan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga dimensi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mendukung keinginan perusahaan. Dimensi *environmental* fokus pada perlindungan lingkungan, dimensi *social* fokus pada hubungan dan dampak sosial terhadap masyarakat, sedangkan dimensi *governance* menjamin penerapan tata kelola yang baik sesuai regulasi. Integrasi ketiga ini diyakini mampu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Tarihoran et al., 2025).

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Menurut Adji Darmawan et al (2025) dijelaskan bahwa penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang keberlanjutan, meningkatkan kinerja perusahaan, serta membangun kepercayaan *stakeholder*, sekaligus mendukung strategi bisnis berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara itu, Nur et al (2025) menyebutkan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta menilai kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan aspek keuangan tetapi juga aspek non-keuangan.

Menurut *Indonesia Enviroment & Energy Center* (2023) manfaat *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik

Perusahaan yang mampu mengelola risiko lingkungan dan sosial dengan baik akan terhindar dari masalah hukum, kerugian finansial, dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

2. Efisiensi Operasional

Mendorong perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Contohnya, dengan mengurangi limbah, menghemat energy, dan menggunakan sumber daya secara bijak, biaya produksi maupun operasional dapat ditekan.

3. Peningkatan Daya Saing

Perusahaan menjadi lebih unggul dalam persaingan. Perusahaan dapat menarik konsumen yang peduli terhadap isu keberlanjutan dan merekrut talenta yang tertarik dengan visi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

4. Peningkatan Keterlibatan Karyawan

Kebijakan yang mendukung kebersihan, inklusi, dan kesejahteraan karyawan mampu meningkatkan rasa keterlibatan serta kepuasan kerja. Dampaknya, tingkat pergantian karyawan menurun dan produktivitas meningkat.

5. Akses Modal Lebih Baik

Investor yang semakin mempertimbangkan faktor keberlanjutan cenderung memberikan dukungan modal kepada perusahaan yang menerapkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara konsisten.

2.1.2.4 Pengukuran *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Pengukuran *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan proses untuk menilai sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas operasionalnya (Johan et al., 2025).

Di Indonesia, penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi bagian dari program keberlanjutan yang diatur dalam regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program keberlanjutan secara berkala. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dengan jelas mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang mengukur serta mengkomunikasikan kinerja perusahaan di bidang *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang berguna untuk mendukung transparansi dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaporan agar sejalan dengan standar internasional.

Dalam penelitian ini, pengukuran *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menggunakan pendekatan pengungkapan ESG (*ESG Disclosure*). *ESG Disclosure* merupakan bentuk pertanggungjawaban transparansi atas hasil aktivitas yang dilakukan perusahaan, yang dapat mempertahankan dan meningkatkan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, khususnya kreditor dan investor sebagai pihak pemberi dana perusahaan (Johan et al., 2025). Pengukuran dilakukan dengan mengidentifikasi dan menilai informasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang diungkapkan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengukuran *ESG Disclosure* dapat dilakukan dengan mengacu pada Standar GRI. Standar GRI, yang juga dikenal sebagai *GRI Standard*, merupakan lembaga internasional independen yang menetapkan pedoman serta standar global dalam penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) (Avindra, 2023). Pada penelitian ini penulis menggunakan *GRI Standard* 2018 untuk tahun 2020-2022 dan *GRI Standard* 2021 untuk tahun 2023-2024. Penggunaan dua standar tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan standar pelaporan yang berlaku pada masing-masing tahun pengamatan, sehingga pengukuran *ESG Disclosure* tetap relevan dan dapat dibandingkan secara valid antar periode.

GRI *Standard* 2018 terdiri dari 144 yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, yaitu:

1. Standar GRI 102 terdiri dari 56 item pengungkapan
2. Standar GRI 103 terdiri dari 3 item pengungkapan
3. Standar GRI 200 terdiri dari 13 item pengungkapan
4. Standar GRI 300 terdiri dari 32 item pengungkapan
5. Standar GRI 400 terdiri dari 40 item pengungkapan

GRI *Standard* 2021 terdiri dari 117 item pengungkapan yang dikelompokkan dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Standar GRI 2 terdiri dari 30 item pengungkapan
2. Standar GRI 3 terdiri dari 3 item pengungkapan
3. Standar GRI 200 terdiri dari 17 item pengungkapan
4. Standar GRI 300 terdiri dari 31 item pengungkapan
5. Standar GRI 400 terdiri dari 36 item pengungkapan

Dalam teknik GRI, setiap item pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan dinilai dengan angka “1” apabila diungkapkan, dan angka “0” apabila tidak diungkapkan. Setelah itu, jumlah item yang diungkapkan akan dijumlahkan lalu dibagi dengan total indikator pengungkapan yang digunakan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut (Ariasinta et al., 2024):

$$ESG\ Disclosure = \frac{\sum ESG}{n}$$

Keterangan:

Σ ESG = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

n = Jumlah item yang seharusnya diungkapkan

Indikator yang digunakan penulis dalam menentukan standar ESG

Disclosure adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Item Pengungkapan *GRI Standard 2018*

Indikator Kinerja	Keterangan
Pengungkapan Umum	Profil Organisasi
	Pengungkapan 102-1: Nama organisasi
	Pengungkapan 102-2: Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
	Pengungkapan 102-3: Lokasi kantor pusat
	Pengungkapan 102-4: Lokasi operasi
	Pengungkapan 102-5: Kepemilikan dan bentuk hukum
	Pengungkapan 102-6: Pasar yang dilayani
	Pengungkapan 102-7: Skala organisasi
	Pengungkapan 102-8: Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
	Pengungkapan 102-9: Rantai pasokan
	Pengungkapan 102-10: Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
	Pengungkapan 102-11: Pendekatan atau prinsip pencegahan
	Pengungkapan 102-12: Inisiatif eksternal
	Pengungkapan 102-13: Keanggotaan asosiasi
	Strategi
	Pengungkapan 102-14: Pernyataan dari pembuat keputusan senior
	Pengungkapan 102-15: Dampak, risiko, dan peluang
	Etika dan Integritas
	Pengungkapan 102-16: Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
	Pengungkapan 102-17: Mekanisme untuk saran dan masalah etika
	Tata Kelola
	Pengungkapan 102-18: Struktur dan Tata Kelola
	Pengungkapan 102-19: Mendelegasikan wewenang
	Pengungkapan 102-20: Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 102-21: Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
	Pengungkapan 102-22: Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya
	Pengungkapan 102-23: Ketua badan tata kelola tertinggi
	Pengungkapan 102-24: Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi
	Pengungkapan 102-25: Konflik kepentingan
	Pengungkapan 102-26: Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi
	Pengungkapan 102-27: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
	Pengungkapan 102-28: Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
	Pengungkapan 102-29: Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
	Pengungkapan 102-30: Keefektifan proses manajemen risiko
	Pengungkapan 102-31: Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
	Pengungkapan 102-32: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
	Pengungkapan 102-33: Mengomunikasikan hal-hal kritis
	Pengungkapan 102-34: Sifat dan jumlah total hal-hal kritis
	Pengungkapan 102-35: Kebijakan remunerasi
	Pengungkapan 102-36: Proses untuk menentukan remunerasi
	Pengungkapan 102-37: Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi
	Pengungkapan 102-38: Rasio kompensasi total tahunan
	Pengungkapan 102-39: Presentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan
	Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 102-40: Daftar kelompok pemangku kepentingan
	Pengungkapan 102-41: Perjanjian perundingan kolektif
	Pengungkapan 102-42: Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
	Pengungkapan 102-43: Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
	Pengungkapan 102-44: Topik utama dan masalah yang dikemukakan
	Praktik Pelaporan
	Pengungkapan 102-45: Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan di konsolidasi
	Pengungkapan 102-46: Menetapkan isi laporan dan batasan topic
	Pengungkapan 102-47: Daftar topik material
	Pengungkapan 102-48: Penyajian kembali informasi
	Pengungkapan 102-49: Perubahan dalam pelaporan
	Pengungkapan 102-50: Periode pelaporan
	Pengungkapan 102-51: Tanggal laporan terbaru
	Pengungkapan 102-52: Siklus pelaporan
	Pengungkapan 102-53: Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
	Pengungkapan 102-54: Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
	Pengungkapan 102-55: Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
	Pengungkapan 102-56: <i>Assurance</i> dari pihak eksternal
	Pendekatan Manajemen
	Pengungkapan 103-1: Penjelasan topik material dan batasannya
	Pengungkapan 103-2: Pendekatan manajemen dan komponennya
	Pengungkapan 103-3: Evaluasi pendekatan manajemen
Ekonomi	Kinerja Ekonomi
	Pengungkapan 201-1: Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 201-2: Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
	Pengungkapan 201-3: Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
	Pengungkapan 201-4: Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
	Keberadaan di Pasar
	Pengungkapan 202-1: Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
	Pengungkapan 202-2: Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	Pengungkapan 203-1: Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
	Pengungkapan 203-2: Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
	Praktik Pengadaan
	Pengungkapan 204-1: Proporsi pengeluaran untuk pemasok local
	Anti Korupsi
	Pengungkapan 205-1: Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
	Pengungkapan 205-2: Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
	Pengungkapan 205-3: Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
	Perilaku Anti Persaingan
	Pengungkapan 206-1: Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
Lingkungan	Material
	Pengungkapan 301-1: Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	Pengungkapan 301-2: Material input dari daur ulang yang digunakan
	Pengungkapan 301-3: Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
	Energi

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 302-1: Konsumsi Energi dalam Organisasi
	Pengungkapan 302-2: Konsumsi Energi di Luar Organisasi
	Pengungkapan 302-3: Intensitas Energi
	Pengungkapan 302-4: Pengurangan Konsumsi Energi
	Pengungkapan 302-5: Pengurangan pada Energi yang dibutuhkan Untuk Produk dan jasa
	Air dan Efluen
	Pengungkapan 303-1: Interaksi dengan Air sebagai Sumber Daya Bersama
	Pengungkapan 303-2: Manajemen dampak yang berkaitan dengan Pembuangan Air
	Pengungkapan 303-3: Pengambilan Air
	Pengungkapan 303-4: Pembuangan Air
	Pengungkapan 303-5: Konsumsi Air
	Keanekaragaman Hayati
	Pengungkapan 304-1: Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	Pengungkapan 304-2: Dampak Signifikan dari Aktivitas, Produk, dan Jasa pada Keanekaragaman Hayati
	Pengungkapan 304-3: Habitat yang dilindungi atau direstorasi
	Pengungkapan 304-4: Spesies Daftar Merah IUCN dan Spesies daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang terkena Efek Operasi
	Emisi
	Pengungkapan 305-1: Emisi GRK (Cakupan 1) Langsung
	Pengungkapan 305-2: Emisi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung
	Pengungkapan 305-3: Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya
	Pengungkapan 305-4: Intensitas Emisi GRK
	Pengungkapan 305-5: Pengurangan Emisi GRK
	Pengungkapan 305-6: Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 305-7: Nitrogen Oksida (Nox), Belerang Oksida (Sox), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya
	Efluen dan Limbah (2016)
	Pengungkapan 306-1: Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan
	Pengungkapan 306-2: Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	Pengungkapan 306-3: Tumpahan yang signifikan
	Pengungkapan 306-4: Pengangkutan limbah berbahaya
	Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
	Kepatuhan Lingkungan
	Pengungkapan 307-1: Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan Hidup
	Penilaian Lingkungan Pemasok
	Pengungkapan 308-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
	Pengungkapan 308-2: Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Sosial	Kepegawaian
	Pengungkapan 401-1: Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
	Pengungkapan 401-2: Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
	Pengungkapan 401-3: Cuti melahirkan
	Hubungan Tenaga Kerja dengan Manajemen
	Pengungkapan 402-1: Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
	Pengungkapan 403-1: Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
	Pengungkapan 403-2: Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
	Pengungkapan 403-3: Layanan kesehatan kerja
	Pengungkapan 403-4: Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 403-5: Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
	Pengungkapan 403-6: Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
	Pengungkapan 403-7: Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
	Pengungkapan 403-8: Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
	Pengungkapan 403-9: Kecelakaan kerja
	Pengungkapan 403-10: Penyakit Akibat Kerja
	Pelatihan dan Pendidikan
	Pengungkapan 404-1: Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
	Pengungkapan 404-2: Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
	Pengungkapan 404-3: Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
	Keanekaragaman dan Kesempatan Setara
	Pengungkapan 405-1: Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
	Pengungkapan 405-2: Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
	Non diskriminasi
	Pengungkapan 406-1: Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif
	Pengungkapan 407-1: Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
	Pekerja Anak
	Pengungkapan 408-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
	Pekerja Wajib Kerja
	Pengungkapan 409-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
	Praktik Pengamanan

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 410-1: Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	Hak-hak Masyarakat Adat
	Pengungkapan 411-1: Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
	Penilaian Hak Asasi Manusia
	Pengungkapan 412-1: Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
	Pengungkapan 412-2: Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	Pengungkapan 412-3: Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
	Masyarakat Lokal
	Pengungkapan 413-1: Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
	Pengungkapan 413-2: Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
	Penilaian Sosial Pemasok
	Pengungkapan 414-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
	Pengungkapan 414-2: Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
	Kebijakan Publik
	Pengungkapan 415-1: Kontribusi politik
	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
	Pengungkapan 416-1: Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
	Pengungkapan 416-2: Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
	Pemasaran dan Pelabelan
	Pengungkapan 417-1: Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
	Pengungkapan 417-2: Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa

Indikator Kinerja	Keterangan
	Pengungkapan 417-3: Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
	Privasi Pelanggan
	Pengungkapan 418-1: Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
	Kepatuhan Sosial Ekonomi
	Pengungkapan 419-1: Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Sumber: www.globalreporting.org

Tabel 2. 2 Item Pengungkapan GRI Standard 2021

No	Standar	Disclosure
Pengungkapan Umum		
1. Organisasi dan Praktik Pelaporan		
1	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Pengungkapan 2-1: Rincian organisasi
2		Pengungkapan 2-2: Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi
3		Pengungkapan 2-3: Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
4		Pengungkapan 2-4: Penyajian kembali informasi
5		Pengungkapan 2-5: Penjaminan eksternal
2. Aktivitas dan Pekerja		
6	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Pengungkapan 2-6: Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
7		Pengungkapan 2-7: Tenaga kerja
8		Pengungkapan 2-8: Pekerja yang bukan pekerja langsung
3. Tata Kelola		
9	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Pengungkapan 2-9: Struktur dan komposisi tata kelola
10		Pengungkapan 2-10: Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
11		Pengungkapan 2-11: Ketua badan tata kelola tertinggi

No	Standar	Disclosure
12		Pengungkapan 2-12: Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
13		Pengungkapan 2-13: Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
14		Pengungkapan 2-14: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
15		Pengungkapan 2-15: Konflik kepentingan
16		Pengungkapan 2-16: Komunikasi masalah penting
17		Pengungkapan 2-17: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
18		Pengungkapan 2-18: Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
19		Pengungkapan 2-19: Kebijakan remunerasi
20		Pengungkapan 2-20: Proses untuk menentukan remunerasi
21		Pengungkapan 2-21: Rasio kompensasi total tahunan
4. Strategi, Kebijakan, dan Praktik		
22	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Pengungkapan 2-22: Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
23		Pengungkapan 2-23: Komitmen kebijakan
24		Pengungkapan 2-24: Menambahkan komitmen kebijakan
25		Pengungkapan 2-25: Proses untuk memperbaiki dampak negatif
26		Pengungkapan 2-26: Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
27		Pengungkapan 2-27: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
28		Pengungkapan 2-28: Asosiasi keanggotaan
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
29	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Pengungkapan 2-29: Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
30		Pengungkapan 2-30: Perjanjian perundingan kolektif
Topik Material		

No	Standar	Disclosure
31	GRI 3: Topik Material 2021	Pengungkapan 3-1: Proses atau panduan untuk menentukan topik material
32		Pengungkapan 3-2: Daftar topik material
33		Pengungkapan 3-3: Manajemen topik material
34	GRI 201: Kinerja Ekonomi	Pengungkapan 201-1: Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
35		Pengungkapan 201-2: Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
36		Pengungkapan 201-3: Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
37		Pengungkapan 201-4: Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
38	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	Pengungkapan 202-1: Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
39		Pengungkapan 202-2: Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
40	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	Pengungkapan 203-1: Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
41		Pengungkapan 203-2: Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
42	GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	Pengungkapan 204-1: Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
43	GRI 205: Antikorupsi 2016	Pengungkapan 205-1: Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
44		Pengungkapan 205-2: Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
45		Pengungkapan 205-3: Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
46	GRI 206: Perilaku Anti Persaingan 2016	Pengungkapan 206-1: Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
47	GRI 207: Pajak 2019	Pengungkapan 207-1: Pendekatan terhadap pajak

No	Standar	Disclosure
48		Pengungkapan 207-2: Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
49		Pengungkapan 207-3: Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan
50		Pengungkapan 207-4: Laporan per Negara
51	GRI 301: Material 2016	Pengungkapan 301-1: Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
52		Pengungkapan 301-2: Material input dari daur ulang yang digunakan
53		Pengungkapan 301-3: Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
54	GRI 302: Energi 2016	Pengungkapan 302-1: Konsumsi Energi dalam Organisasi
55		Pengungkapan 302-2: Konsumsi Energi di Luar Organisasi
56		Pengungkapan 302-3: Intensitas Energi
57		Pengungkapan 302-4: Pengurangan Konsumsi Energi
58		Pengungkapan 302-5: Pengurangan pada Energi yang dibutuhkan Untuk Produk dan Jasa
59	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Pengungkapan 303-1: Interaksi dengan Air sebagai Sumber Daya Bersama
60		Pengungkapan 303-2: Manajemen Dampak yang berkaitan dengan Pembuangan Air
61		Pengungkapan 303-3: Pengambilan Air
62		Pengungkapan 303-4: Pembuangan Air
63		Pengungkapan 303-5: Konsumsi Air
64	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Pengungkapan 304-1: Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
65		Pengungkapan 304-2: Dampak Signifikan dari Aktivitas, Produk, dan Jasa pada Keanekaragaman Hayati
66		Pengungkapan 304-3: Habitat yang dilindungi atau direstorasi

No	Standar	Disclosure
67		Pengungkapan 304-4: Spesies Daftar Merah IUCN dan Spesies daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang terkena Efek Operasi
68	GRI 305: Emisi 2016	Pengungkapan 305-1: Emisi GRK (Cakupan 1) Langsung
69		Pengungkapan 305-2: Emisi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung
70		Pengungkapan 305-3: Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya
71		Pengungkapan 305-4: Intensitas Emisi GRK
72		Pengungkapan 305-5: Pengurangan Emisi GRK
73		Pengungkapan 305-6: Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)
74		Pengungkapan 305-7: Nitrogen Oksida (Nox), Belerang Oksida (Sox), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya
75	GRI 306: Limbah 2020	Pengungkapan 306-1: Timbulan Limbah dan Dampak Signifikan terkait Limbah
76		Pengungkapan 306-2: Manajemen Dampak Signifikan terkait Limbah
77		Pengungkapan 306-3: Timbulan Limbah
78		Pengungkapan 306-4: Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir
79		Pengungkapan 306-5: Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir
80	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	Pengungkapan 308-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
81		Pengungkapan 308-2: Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
82	GRI 401: Kepegawaian 2016	Pengungkapan 401-1: Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
83		Pengungkapan 401-2: Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
84		Pengungkapan 401-3: Cuti melahirkan
85	GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	Pengungkapan 402-1: Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional

No	Standar	Disclosure
86	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Pengungkapan 403-1: Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
87		Pengungkapan 403-2: Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
88		Pengungkapan 403-3: Layanan kesehatan kerja
89		Pengungkapan 403-4: Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
90		Pengungkapan 403-5: Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
91		Pengungkapan 403-6: Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
92		Pengungkapan 403-7: Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
93		Pengungkapan 403-8: Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
94		Pengungkapan 403-9: Kecelakaan kerja
95		Pengungkapan 403-10: Penyakit Akibat Kerja
96	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	Pengungkapan 404-1: Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
97		Pengungkapan 404-2: Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
98		Pengungkapan 404-3: Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
99	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	Pengungkapan 405-1: Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
100		Pengungkapan 405-2: Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
101	GRI 406: Nondiskriminasi 2016	Pengungkapan 406-1: Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
102	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	Pengungkapan 407-1: Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko

No	Standar	Disclosure
103	GRI 408: Pekerja anak 2016	Pengungkapan 408-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
104	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	Pengungkapan 409-1: Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
105	GRI 410: Praktik Keamanan 2016	Pengungkapan 410-1: Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
106	GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	Pengungkapan 411-1: Insiden pelanggaran yang melibatkan hak hak masyarakat adat
107	GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	Pengungkapan 413-1: Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
108		Pengungkapan 413-2: Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
109	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	Pengungkapan 414-1: Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
110		Pengungkapan 414-2: Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
111	GRI 415: Kebijakan Publik 2016	Pengungkapan 415-1: Kontribusi politik
112	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	Pengungkapan 416-1: Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
113		Pengungkapan 416-2: Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
114	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	Pengungkapan 417-1: Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
115		Pengungkapan 417-2: Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
116		Pengungkapan 417-3: Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

No	Standar	Disclosure
117	GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	Pengungkapan 418-1: Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Sumber: GRI 2021

2.1.3 *Intellectual Capital*

2.1.3.1 Pengertian *Intellectual Capital*

Menurut Arifin et al (2021:36) pengertian *Intellectual Capital* adalah sebagai berikut:

“Jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, costumer capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi”.

Menurut Ulum (2015:79) dalam bukunya *Intellectual Capital*, terdapat beberapa definisi mengenai *Intellectual Capital* yang dikemukakan oleh ahli.

Pengertian *Intellectual Capital* dari beberapa peneliti adalah sebagai berikut:

1. “*Intellectual Capital* sebagai jumlah dari segala sesuatu yang ada di perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk berkompetisi di pasar, meliputi *intellectual material* – pengetahuan, informasi, pengalaman, dan *intellectual property* – yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan” (Stewart, 1997).
2. “*Intellectual Capital* meliputi seluruh proses dan aset yang tidak secara normal nampak di neraca dan semua *intangible assets* (*trademarks, patent and brands*) yang menjadi perhatian metode akuntansi modern” (Rose et al., 1997).

3. “*Intellectual Capital* adalah istilah yang diberikan kepada kombinasi dari aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan, dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk dapat berfungsi” (Brooking,1996).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Intellectual Capital* pada dasarnya merujuk pada kumpulan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan, baik berupa pengetahuan, informasi, pengalaman, maupun hak kekayaan intelektual. Keseluruhan elemen tersebut berperan penting dalam mendukung proses bisnis, menciptakan nilai tambah, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

2.1.3.2 Peran dan Tujuan *Intellectual Capital* dalam Perusahaan

Intellectual Capital berperan penting bagi perusahaan karena menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Santoso & Surenggono (2025) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengoptimalkan *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* akan lebih adaptif terhadap dinamika pasar serta lebih mampu menjaga profitabilitas dalam jangka panjang karena *Intellectual Capital* berperan sebagai aset strategis yang mendorong efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, Astriwati et al (2025) menambahkan bahwa pemanfaatan *Intellectual Capital* yang optimal membantu perusahaan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan.

Selain memiliki peran strategis, *Intellectual Capital* juga memiliki tujuan dalam pengelolaannya yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah. Tujuan pengelolaan *Intellectual Capital* adalah menghasilkan *value added* melalui optimalisasi seluruh aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh. Gani (2022) menjelaskan bahwa penciptaan nilai tambah hanya dapat terwujud apabila manajemen mampu memperdayakan seluruh sumber daya, baik karyawan, aset fisik, maupun *structural capital*, dengan mengubah orientasi bisnis dari berbasis tenaga kerja menjadi berbasis pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dapat tercapai apabila perusahaan mampu memaksimalkan keahlian, pengetahuan, serta jaringan yang dimiliki karyawan, karena individu dengan kompetensi tinggi menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan (R. A. Putri et al., 2023).

2.1.3.3 Komponen *Intellectual Capital*

Menurut Arifin et al (2021:37-40) *Intellectual Capital* terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. *Human Capital* (Modal Manusia)

Human Capital merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual. Disinilah sumber *innovation* dan *improvement*, tetapi merupakan komponen yang sulit diukur. *Human Capital* juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi, dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human Capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan

untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. *Human Capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dalam modal ini, yaitu *training programs, credential, experience, competence, recruitment, learning programs, individual potential and personality*.

2. *Structural Capital* atau *Organization Capital* (Modal Organisasi)

Structural Capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya sistem operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. *Relational Capital* atau *Consumer Capital* (Modal Pelanggan)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational Capital* merupakan hubungan yang harmonis/*association network* yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang

bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

2.1.3.4 Pengukuran *Intellectual Capital*

Dalam penelitian ini, *intellectual capital* diukur menggunakan metode yang disebut *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM). Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 dan bertujuan menyajikan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud (*tangible assets*) maupun aset tidak berwujud (*intangible assets*). Peningkatan nilai *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan sumber daya, terutama pengetahuan karyawan, untuk menghasilkan nilai ekonomi baru (Marzo, 2022). *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) berfokus pada tiga komponen utama: *human capital*, *capital employed*, dan *structural capital*.

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* yaitu selisih antara *output* (pendapatan dari produk/jasa) dan *input* (beban untuk memperoleh pendapatan). Tenaga kerja tidak dianggap sebagai biaya, melainkan sebagai penciptaan nilai (*value creation*), sehingga beban karyawan (*labour expense*) tidak masuk dalam komponen input. Dengan demikian, karyawan dipandang sebagai entitas utama dalam proses penciptaan nilai. Menurut Pulic (1998) dalam Ulu (2015:132) terdapat 5 tahapan perhitungan untuk memperoleh nilai *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) yaitu:

1. Menghitung *Value Added* (VA)

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Value Added* (VA) adalah sebagai berikut:

$$VA = OUT - IN$$

Keterangan:

Output (OUT) = Total Penjualan dan pendapatan lain

Input (IN) = Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan)

2. Menghitung *Value Added of Capital Employed* (VACA)

Value Added of Capital Employed (VACA) merupakan rasio antara *Value Added* (VA) dengan *Capital Employed* (CE). Rasio ini memperlihatkan kontribusi yang diberikan oleh setiap unit *Capital Employed* (CE) terhadap *Value Added* (VA) organisasi. Dengan demikian, *Value Added of Capital Employed* (VACA) menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan modal fisik untuk menghasilkan nilai tambah secara lebih optimal. *Value Added of Capital Employed* (VACA) dapat dihitung dengan rumus:

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

Capital Employed (CE) = Dana yang tersedia (Total Ekuitas)

3. Menghitung *Value Added of Human Capital* (VAHU)

Value Added of Human Capital (VAHU) menggambarkan kontribusi yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan pada *Human Capital* (HC) untuk *Value Added* (VA) organisasi. Rasio ini menunjukkan hubungan antara *Value Added* (VA) dan *Human Capital* (HC), yang sekaligus mencerminkan kemampuan *Human Capital* (HC) dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. *Value Added of Human Capital* (VAHU) dapat dihitung dengan rumus:

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan:

Human Capital (HC) = Beban karyawan dan tunjangan

4. Menghitung *Structural Capital Value Added* (STVA)

Structural Capital Value Added (STVA) adalah rasio antara *Structural Capital* (SC) dan *Value Added* (VA), yang digunakan untuk mengukur jumlah *Structural Capital* (SC) yang diperlukan dalam menghasilkan satu rupiah *Value Added* (VA). Dengan demikian, *Structural Capital Value Added* (STVA) menjadi indikator efektivitas *Structural Capital* (SC) dalam mendukung penciptaan nilai di dalam organisasi. *Structural Capital Value Added* (STVA) dapat dihitung dengan rumus:

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan:

Structural Capital (SC) = VA – HC

5. Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM)

Rasio ini merupakan hasil kalkulasi yang mencerminkan kapasitas intelektual perusahaan. Formulasi *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) didasarkan pada penggabungan komponen utama, yaitu *Value Added of Capital Employed* (VACA), *Value Added of Human Capital* (VAHU), dan *Structural Capital Value Added* (STVA), sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja *intellectual capital* perusahaan.

$$VAIC = VACA + VAHU + STVA$$

Keterangan:

VACA = *Value Added of Capital Employed*

VAHU = *Value Added of Human Capital*

STVA = *Structural Capital Value Added*

2.1.4 Kinerja Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan salah satu konsep yang sering dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan suatu organisasi. Konsep ini banyak dibahas dalam literatur akuntansi dan manajemen karena berhubungan erat dengan efektivitas strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sejumlah ahli memberikan pengertian yang beragam mengenai kinerja perusahaan sesuai dengan perspektif masing-masing.

Menurut Beaver (1967) dalam Rahayu (2020:6) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen perusahaan. Adapun keputusan itu meliputi keputusan investasi, operasional dan pembiayaan”.

Menurut Anabella & Siregar (2022) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kinerja perusahaan adalah kemampuan suatu organisasi /perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang serendah mungkin, tanpa melupakan kepuasan yang didapatkan oleh para *stakeholders* dalam menjalankan bisnisnya”.

Menurut Nugroho & Hersugondo (2022) pengertian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

“Kinerja perusahaan merupakan gambaran keadaan sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu yang menjadi hasil dari kegiatan operasional yang dilakukannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki”.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, kinerja perusahaan dapat dipahami sebagai ukuran kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kinerja mencerminkan hasil operasional yang dicapai dalam periode tertentu, sekaligus menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan biaya minimal serta memperhatikan kepuasan *stakeholder*. Dengan kata lain, kinerja perusahaan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan membangun keunggulan kompetitif.

2.1.4.2 Peran dan Tujuan Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan memiliki peran yang sangat strategis, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Novianti & Wijaya (2024) menyatakan bahwa kinerja perusahaan melalui aspek kinerja keuangan berperan sebagai dasar dalam menilai kondisi perusahaan, sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai dan menarik minat investor. Selain itu, kinerja perusahaan berperan sebagai indikator pencapaian prestasi dan sebagai alat evaluasi untuk menilai pencapaian target yang telah ditetapkan melalui kinerja manajemen (Daeli et al., 2024).

Adapun tujuan dari kinerja perusahaan dapat ditinjau dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Hafizi et al (2025) menjelaskan bahwa penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen bertujuan untuk mengelola operasi secara efektif, mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, dan menjadi dasar dalam penentuan strategi perusahaan ke depan. Sementara itu, dari perspektif investor dan pemegang saham, tujuan profitabilitas dalam kinerja perusahaan adalah untuk memastikan perusahaan mampu memberikan pengembalian yang memuaskan bagi investor dan pemegang saham sehingga mereka tetap menyediakan modal (Novianti & Wijaya, 2024). Selain itu, tujuan kinerja perusahaan yang tercermin melalui penilaian kinerja manajemen adalah untuk memulai pencapaian target perusahaan serta mengukur kondisi keuangan melalui indikator likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas usaha sebagai dasar dalam menilai perkembangan kinerja perusahaan (Daeli et al., 2024).

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mencapai tujuan strategis dan operasionalnya dalam suatu periode tertentu. Informasi mengenai kinerja perusahaan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, baik bagi manajemen internal maupun pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dalam kinerja perusahaan rasio keuangan berfungsi sebagai indikator utama untuk membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan dalam menilai kondisi serta performa finansial perusahaan (Ramadhan et al., 2024).

Salah satu kelompok indikator yang paling sering digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih (Astuti et al., 2021).

Return on Assets (ROA) dipilih karena dipandang sebagai indikator yang tepat untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset dan modal yang dimilikinya. Hal ini menjadi relevan karena sektor *consumer non-cyclical* memiliki tingkat keberlangsungan tinggi, mengingat perannya langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Saputra, 2021). Tingginya nilai *Return on Assets* (ROA) menunjukkan efektivitas

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. *Return on Assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Warae et al., 2024:25):

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Febry Antonius dan Ida Ida (2023)	Pengaruh <i>Enviromental, Social, Governance</i> (ESG) dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Perusahaan	Hasil studi menyimpulkan bahwa ESG dan <i>intellectual capital</i> terbukti berpengaruh positif pada kinerja perusahaan yang bergerak dalam sektor <i>energy</i> , sektor <i>basic material</i> , dan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI serta yang sudah mempublikasikan laporan ESG dalam rentang periode 5 tahun (2017 hingga 2021).
2	Machillah Afany Durlista dan Ickhsanto Wahyudi (2023)	Pengaruh Pengungkapan <i>Enviromental, Social, Governance</i> (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2017-2022	- Pengungkapan aspek lingkungan memiliki efek positif terhadap ROA dan ROE, tetapi tidak mempengaruhi Tobin's Q. - Pengungkapan aspek sosial berhubungan positif dengan Tobin's Q, tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dan ROE. - Pengungkapan aspek tata kelola berhubungan positif dengan ROE dan Tobin's Q, tetapi tidak memiliki dampak terhadap ROA.
3	Muhammad Zidane Ramadhan, Suherman, dan Destria Kurnianti (2024)	Pengaruh <i>Enviromental, Social, Governance</i> (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Aneka Industri	Hasil studi menyimpulkan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022	
4	Maulida Nur Safriani dan Dwi Cahyo Utomo (2020)	Pengaruh <i>Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure</i> terhadap Kinerja Perusahaan	Pengujian variabel <i>ESG disclosure</i> terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan, kinerja keuangan perusahaan dan kinerja pasar perusahaan.
5	Gustin Ningwati, Ratna Septiyanti, dan Neny Desriani (2022)	Pengaruh <i>Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure</i> terhadap Kinerja Perusahaan (The Effect of <i>Environmental, Social and Governance Disclosure on Corporate Performance</i>)	- <i>ESG Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap ROE. - <i>ESG Disclosure</i> pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q.
6	Silvia Sari dan Elly Rahmalia Sunandi (2026)	Pengaruh Struktur Modal, <i>Leverage</i> dan <i>Environmental, Social, Governance (ESG)</i> terhadap Kinerja Perusahaan	- Struktur modal, <i>Leverage</i> dan ESG secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. - Secara parsial, ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan, dan struktur modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
7	M. Dodik Suprayogi dan Pratiwi Dwi Karyati (2020)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Intellectual capital</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Loan (NPL)</i> namun ditemukan hasil bahwa <i>Intellectual capital</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> , <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Net Interest</i>

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			<i>Margin</i> (NIM) serta <i>Capital Adquency Ratio</i> (CAR).
8	Victoria dan Nuryasman MN (2020)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Perusahaan	- <i>Structural capital</i> dan <i>relational capital</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA serta berpengaruh negatif terhadap ROA. - <i>Human capital</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
9	Rahmadhanty Kusuma Astari dan Darsono (2020)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Perusahaan	- <i>Structural capital Employed</i> (SCE) dan <i>Capital Employed Efficiency</i> (CEE) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. - <i>Human Capital Employed</i> (HCE) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
10	Melsia dan Novy Silvia Dewi (2021)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Perusahaan dan Nilai Perusahaan	- <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan - <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan
11	Catur Fatchu Ukhriyawati, Sri Mulyati, Ervin Nora Susanti, dan Pronica Imel Donanda (2025)	Pengaruh Environmental Social Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia	- <i>Environmental</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan - <i>Governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan - <i>Social</i> dan <i>intellectual capital</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial - <i>Environmental</i>, <i>Social</i>, <i>Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i>

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan.
12	Christian Very Tarihoran, Pasaman Silaban, dan Sunday Ade C O M Sitorus (2025)	Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia	- Secara parsial, variabel <i>Environmental</i> (EVN) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. - Variabel <i>Social</i> (SOC) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. - Variabel <i>Governance</i> (GOV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. - Secara simultan, ketiga variabel ESG berpengaruh signifikan terhadap ROA.
13	Angela Merici Minggu, Jusuf Aboladaka, dan Godlief Fredrik Neonufa (2023)	<i>Enviromental, Social</i> dan <i>Governance</i> (ESG) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia	- Variabel pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. - Variabel pengungkapan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. - Variabel pengungkapan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
14	Naufal Adi Nugroho dan Hersugondo (2022)	Analisis Pengaruh <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG) <i>Disclosure</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>ESG disclosure</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan

Stakeholder theory menjelaskan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan ditentukan oleh kemampuannya dalam memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham (Mahajan et al., 2023). Informasi yang disampaikan perusahaan kepada pemangku kepentingan berperan penting karena memberikan gambaran mengenai kondisi, prospek, serta tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian (Nisa et al., 2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan cenderung memiliki kinerja lebih baik karena memperoleh kepercayaan dan legitimasi yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pemenuhan harapan tersebut adalah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola risiko non-keuangan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang.

Pengungkapan informasi non-keuangan dapat mendorong perusahaan meningkatkan laba sehingga menarik minat investor (Atrianingsih & Nyale, 2022). Informasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) juga digunakan perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Perusahaan berupaya mengungkapkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) agar modal kerja dan operasional meningkat. Dalam perspektif *stakeholder theory*, keterbukaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) membuat perusahaan lebih dipercaya. Pengungkapan *Environmental, Social, and*

Governance (ESG) yang baik menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada keuntungan finansial tetapi juga pada kemampuan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja (Safriani & Utomo, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan kinerja perusahaan. Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Durlista & Wahyudi, 2023; Safriani & Utomo, 2020; Sari & Sunandi, 2026).

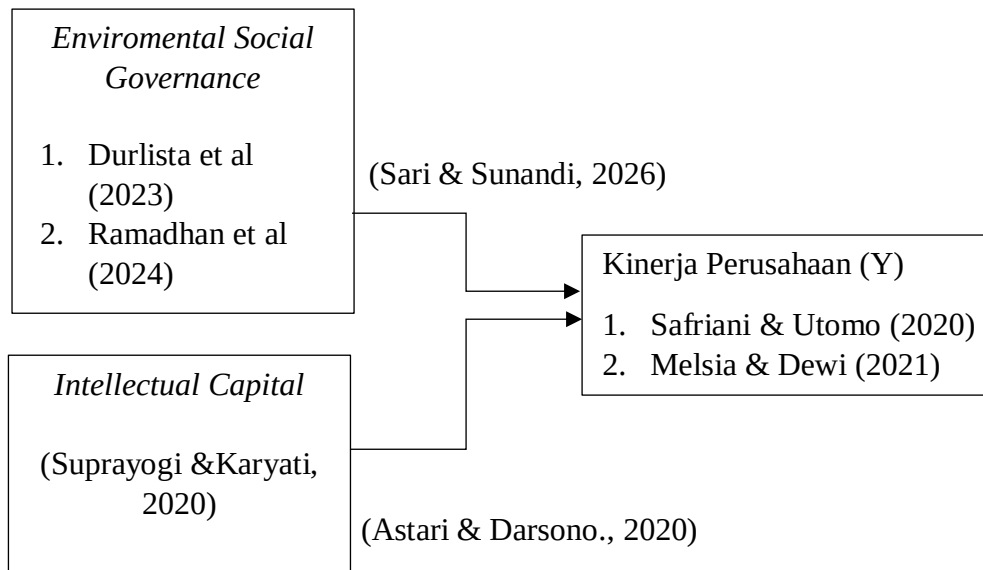
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula potensi peningkatan kinerja perusahaan yang dapat dicapai.

2.2.2 Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan

Stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan harus memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal (Mahajan et al., 2023). Dalam kerangka ini, *Intellectual Capital* dipandang sebagai aset strategis yang mencerminkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai melalui pengetahuan, inovasi, dan hubungan relasional (Arifin et al., 2021). Oleh karena itu, *Intellectual Capital* yang baik menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Pengelolaan *Intellectual Capital* yang efisien memungkinkan perusahaan menciptakan nilai tambah dari aset tak berwujud (*intangible aseets*) yang dimiliki sehingga berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas (R. A. Putri et al., 2023). Dalam perspektif *Stakeholder theory*, perusahaan yang mampu mengoptimalkan *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* akan lebih adaptif terhadap dinamika pasar serta lebih mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (Ali et al., 2022). Kepercayaan yang terbentuk dari pengelolaan *intellectual capital* yang baik mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi efisiensi pengelolaan *intellectual capital*, semakin besar pula potensi peningkatan kinerja perusahaan yang dapat dicapai, karena perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih optimal dari setiap unit sumber daya yang diinvestasikan (Astari & Darsono, 2020; Melsia & Dewi, 2021; Suprayogi & Karyati, 2020).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023:99-100) menyebutkan bahwa hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka diasumsikan jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

H2: *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.